



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. Mayjend. Sungkono No. 24 Purbalingga, Telp. 0281-891336 Fax. 0281-891416

LKjIP

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2017**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

Jl. Mayjend. Sungkono No. 24 Purbalingga, Telp. 0281-891336 Fax. 0281-891416

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas ridhoNYA segala tugas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dalam tahun 2017 secara umum berjalan baik.

Sebagai salah satu pertanggungjawaban tugas, dengan ini kami susun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017. Materi yang disampaikan meliputi semua kegiatan baik yang dibiayai melalui kegiatan rutin maupun pembangunan. Kegiatan tersebut mengacu pada Renstra Dinas tahun 2016-2021. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih jauh dari sempurna dikarenakan sistem manajemen informasi data dan laporan masih perlu dikembangkan.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga seluruh kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dapat berjalan dengan lancar.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan selanjutnya membantu meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Purbalingga Perwira.

Purbalingga, 2017



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Gambaran Umum	4
E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis (Renstra SKPD)	10
B. Penetapan Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	18
B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	19
C. Akuntabilitas Keuangan / Aspek Keuangan	25
BAB IV PENUTUP	
A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan	29
B. Permasalahan Yang Dihadapi	29
C. Strategi Pemecahan Masalah	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1998 tujuan reformasi di Indonesia adalah memperjuangkan terwujudnya adanya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). Guna mencapai terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka setiap akhir tahun anggaran setiap OPD terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Pengukuran Kinerja.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih baik dan benar, efektif, efisien, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.

B. Landasan Hukum

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 / M.PAN / 05/ 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20 / M/PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor. 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor. 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017, tanggal 27 Desember 2016;
14. Peraturan Bupati Purbalingga No. 71 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, tanggal 31 Agustus 2017;
16. Peraturan Bupati Purbalingga No. 80 Tahun 2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dimaksudkan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran guna terwujudnya akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja.

Adapun tujuan penyusunan LKJIP adalah :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi mandat/amanat;
2. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;

3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek;
4. Perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Perbaikan berbagai kebijakan yang diperlukan;

D. Gambaran Umum OPD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga yang beralamat di Jalan Mayor Jendral Sungkono No. 24 Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan;
- e. Pelaksanaan fungsi Kesekretariatan Dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 sebanyak 197 orang, yang terdiri dari :

- | | | |
|---------|---|------------------|
| 1). PNS | = | 74 Orang |
| 2). PTT | = | <u>123 Orang</u> |
| Jumlah | = | 197 Orang |

Keadaan Pegawai s/d Desember 2017

Dilihat Dari Urutan Kepangkatan

NO	JENIS KELAMIN	GOL I				GOL II				GOL III				GOL IV				JML
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e
1	Laki-Laki	2	3	8	9	5	2	5	11	3	10	3	1	1	-	-	63	
2	Perempuan	-	-	-	-	2	1	-	-	4	1	3	-	-	-	-	11	
	Jumlah	-	2	3	-	8	11	6	2	5	15	4	13	3	1	1	-	74

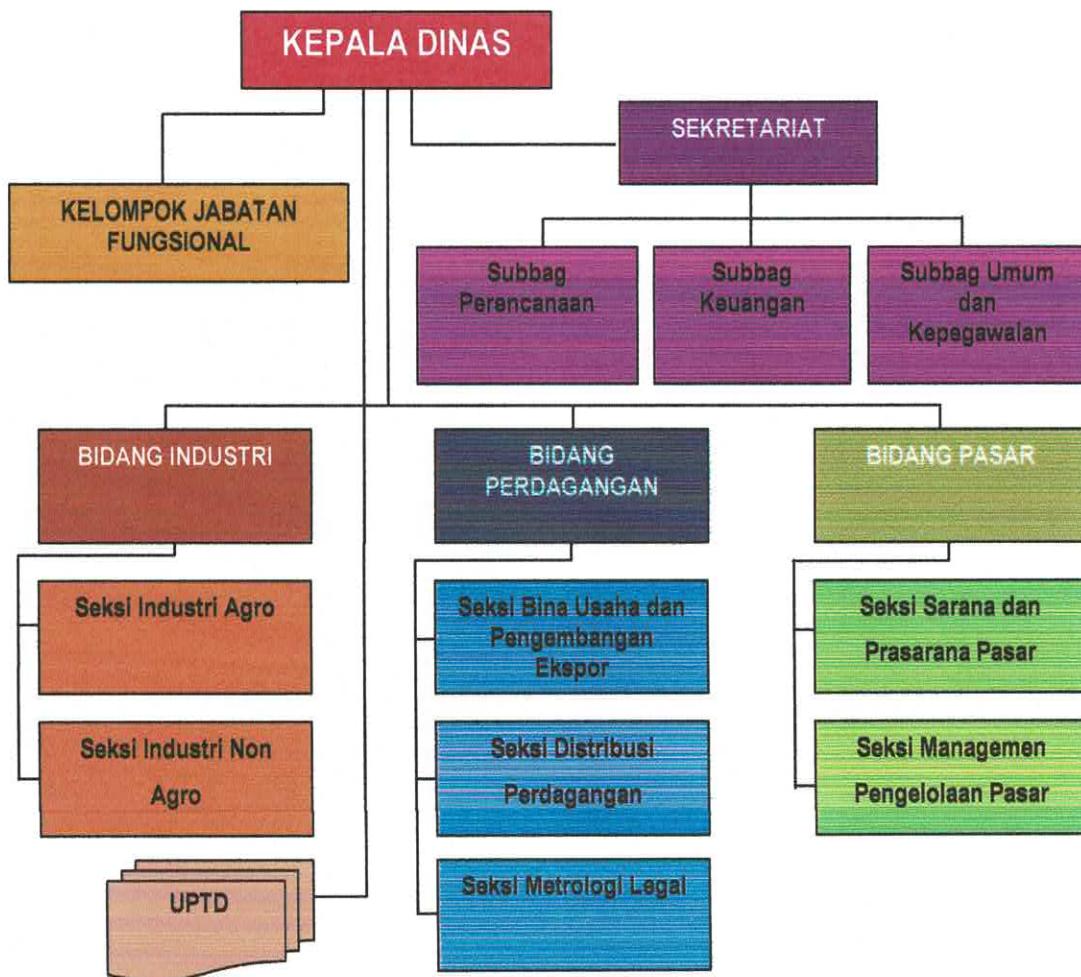
Keadaan Pegawai s/d Desember 2017

Dilihat Dari Urutan Pendidikannya

NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN										JML
		SD	SMP	SMA/K	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Laki-Laki	7	5	30	-	-	1	-	17	3	-	63
2	Perempuan	-	-	4	-	-	-	-	7	0	-	11
	Jumlah	7	5	34	0	0	1	0	24	3	-	74

Sedangkan untuk Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, terdiri dari :

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Kepala Dinas | : | 1 orang |
| 2. Sekretariat | : | 1 orang |
| terdiri dari : | | |
| 1. Subbagian Perencanaan | : | 1 orang |
| 2. Subbagian Keuangan | : | 1 orang |
| 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian | : | 1 orang |
| 3. Bidang Perindustrian | : | 1 orang |
| terdiri dari : | | |
| 1. Seksi Industri Agro | : | 1 orang |
| 2. Seksi Industri Non Agro | : | 1 orang |
| 4. Bidang Perdagangan | : | 1 orang |
| terdiri dari : | | |
| 1. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Ekspor | : | 1 orang |
| 2. Seksi Distribusi Perdagangan | : | 1 orang |
| 3. Seksi Metrologi Legal | : | 1 orang |
| 5. Bidang Pasar | : | 1 orang |
| terdiri dari : | | |
| 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar | : | 1 orang |
| 2. Seksi Manajemen Pengelolaan Pasar | : | 1 orang |
| 6. UPTD terdiri dari : | | |
| 1. UPTD Logam | : | 2 orang |
| 2. UPTD Pasar Segamas | : | 2 orang |
| 7. Kelompok Jabatan Fungsional | : | 6 orang |



2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana untuk saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga menempati 3 (tiga) buah gedung yang terletak di Jl. Mayjend Sungkono yang mana 2 (dua) gedung yang ditempati Bidang Perindustrian dan Bidang Sekretariat status tanahnya adalah masih milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan satu gedung yang ditempati Bidang Perdagangan dan Bidang Pasar status tanahnya milik Pemerintah Daerah Purbalingga.

E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan

dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

Kendati demikian, kondisi UKM tetap rawan karena keberpihakan bank yang rendah, pasar bebas yang mulai dibuka, serta terbatasnya kebijakan yang mendukung sektor usaha kecil. Untuk itu Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Program dan kebijakan pemerintah kedepan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM, disamping itu mampu memecahkan permasalahan utama yang selama ini sering dihadapi UMKM antara lain :

1. Terbatasnya modal;
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah;
3. Kemampuan pemasaran yang terbatas;
4. Akses informasi usaha rendah;
5. Belum terjalin dengan baik kemitraan saling menguntungkan antar pelaku usaha (UMKM, Usaha Besar dan BUMN);
6. Kelembagaan yang belum tertata;

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Gambaran Umum
- E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
- F. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis (Renstra SKPD)

- 1) Visi
- 2) Misi
- 3) Tujuan
- 4) Sasaran
- 5) Kebijakan Program dan Kegiatan

B. Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
- B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan / Aspek Keuangan

BAB IV PENUTUP

- A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan
- B. Permasalahan Yang Dihadapi
- C. Strategi Pemecahan Masalah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)

Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021 adalah :

“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”.

Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan implementasi dari misi kabupaten yang ke – 5 yaitu :

- Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja ”.

Dengan memperhatikan visi dan misi kabupaten tersebut, tersusunlah visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :

“Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang mandiri berdaya saing, berwawasan lingkungan dan pengembangan potensi daerah”.

Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Industri dan perdagangan

Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang maju dan mandiri dengan prinsip efisiensi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi.

b) Berwawasan lingkungan

Usaha yang dikembangkan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

c) Pengembangan potensi daerah

Pengembangan usaha diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Melihat dari misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan implementasi dari misi kabupaten yang ke – 5 yang kemudian dijabarkan menjadi misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu :

- a. Mewujudkan struktur industri dan perdagangan serta keterkaitan hulu hilir yang mantap;
- b. Memfasilitasi perkembangan dunia usaha industri dan perdagangan;
- c. Mendorong terwujudnya efisiensi usaha industri dan perdagangan;
- d. Mewujudkan sistem informasi industri dan perdagangan uptodate;
- e. Mendorong penyerapan tenaga kerja.
- f. Mewujudkan pengawasan dan pelayanan tera tera ulang yang efektif dan berkeadilan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi Misi dan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 sampai 5 tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, transparan dan akuntabel;
- b) Meningkatkan produktifitas dan kualitas produk IKM yang berorientasi eksport;
- c) Terwujudnya One Village One Product (OVOP) atau centra IKM;
- d) Terwujudnya pasar tradisional yang sehat;
- e) Peningkatan Pengamanan Pasar dan Perlindungan Konsumen;
- f) Stabilisasi ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat;
- g) Mengembangkan iklim usaha yang kondusif;
- h) Memantapkan sistem manajemen pembinaan UMKM serta pengembangan tata niaga perdagangan;

- i) Menyediakan data dan informasi penunjang usaha industri, dan perdagangan.

Atas dasar tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a) Meningkatnya pelayanan publik;
- b) Meningkatnya jumlah IKM;
- c) Meningkatkan jenis industri;
- d) Meningkatkan inovasi produk IKM;
- e) Terwujudnya sentra – sentra industri potensial;
- f) Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha;
- g) Tertatanya kawasaan perdagangan;
- h) Meningkatnya nilai Export;
- i) Meningkatnya produktifitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- j) Tumbuh berkembangnya usaha baru;
- k) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja;
- l) Meningkatnya akses pasar;
- m) Meningkatnya penguasaan dan akses teknologi;
- n) Meningkatnya tertib usaha dan perlindungan konsumen;
- o) Meningkatnya perbaikan tata niaga;
- p) Meningkatnya stabilitas harga;

Dalam rangka untuk mencapai tujuan, maka perlu adanya perumusan kebijakan adapun kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur;
- b) Pemantapan kelembagaan UMKMK;
- c) Penumbuhan wira usaha baru;
- d) Menarik investasi;
- e) Merevitalisasi lembaga keuangan non bank;
- f) Ekspansi pasar;
- g) Meningkatkan kapasitas SDM Indagkop;

- h) Penyederhanaan pelayanan perijinan;
- i) Perlindungan konsumen;
- j) Pengendalian stok dan pasokan barang;
- k) Penyediaan data dan media informasi pendukung usaha.
- l) Mengembangkan kemitraan perdagangan;
- m) Meningkatkan promosi produk daerah ;
- n) Meningkatkan pengelolaan pasar.

Dengan kebijakan tersebut dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka program yang dikembangkan dalam rangka pelaksanaan bidang perindustrian dan perdagangan adalah :

- a) Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
- b) Pengembangan diversifikasi usaha;
- c) Penataan dan pendalaman struktur industri dan perdagangan;
- d) Pengembangan pola kemitraan dan pendampingan;
- e) Pengembangan produk berorientasi ekspor;
- f) Pengembangan pasar produk IKM;
- g) Peningkatan kemampuan teknologi produksi;
- h) Peningkatan kualitas sumber daya manusia IKM;
- i) Peningkatan pengetahuan masyarakat akan perlindungan konsumen;
- j) Pengembangan dan peningkatan sistem produksi dan distribusi;
- k) Pendataan dan penyebarluasan informasi pendukung usaha;

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

- a) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
- b) Prosentase sarpras perdagangan yang direvitalisasi

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku industri	Kontribusi PDRB Sektor Industri (Rp. Juta)	3.816.051,20	3.968.693,25	4.127.440,98	4.292.538,62	4.464.240,16	4.642.809,77
Meningkatnya kualitas sarpras perdagangan dan pengamanan perdagangan	Prosentase sarpras perdagangan yang direvitalisasi	19%	24%	29%	33%	38%	43%

B. Penetapan Kinerja 2017

Rencana kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan urusan di bidang perindustrian dan perdagangan tahun 2017 adalah :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku industri	Kontribusi PDRB Sektor Industri	(Rp. Juta)	3.968.693,25
2	Meningkatnya kualitas sarpras perdagangan dan pengamanan perdagangan	Prosentase sarpras perdagangan yang direvitalisasi	%	24%

Tabel
Rencana Kinerja Sasaran Tahun 2017

sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Terdistribusinya Kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.217.005.000
	Terpenuhinya kebutuhan untuk operasional kantor	12 bulan	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	578.343.000
	Terpenuhinya kebutuhan akan perjalanan dinas	200 kali	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	206.054.000

sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
	Terpeliharanya sarana prasarana penunjang kantor	4 bidang	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	325.114.000
	Terpenuhinya sarana fasilitas penunjang kantor	4 bidang	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	95.878.000
	Terlatihnya PNS dalam diklat	20 PNS	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5.000.000
	Terselesaikannya penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, LKPD, RKPD, LKD	6 lap	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	6.616.000
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	327.400.000
	Terpantau dan terkendalinya distribusi dan stok barang ke pokmas di masyarakat	12 bulan	Pengawasan Distribusi Barang Penting dan Strategis serta Penyusunan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat	72.400.000
	Terlaksananya operasi pasar murah bagi masyarakat	18 lokasi	Operasi Pasar / Fasilitasi Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat	230.000.000
	Meningkatnya jumlah UKM berorientasi ekspor	30 UKM	Pelatihan Prosedur Ekspor Bagi UKM Berorientasi Ekspor	25.000.000
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	555.531.000
	Terawasinya peredaran barang kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Monitoring Tera Ulang, Ukur Ulang, BDKT	12 bulan	Pengawasan Perdagangan BDKT dan Barang dalam pengawasan	72.295.000
	Fasilitasi metrologi legal	12 bulan	Metrologi Legal	483.236.000
			Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana & Prasarana	7.356.539.000

sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
			Perdagangan	
	Tersusunnya DED Pusat Cenderamatan	1 paket	Penataan Eks Terminal Jompo	-
	Tertatanya Pasar Arjobinangun	1 paket	Penataan Pasar Arjobinangun	211.956.000
	Terbangunnya kawasan PKL di Kota Purbalingga	1 paket	Penataan PKL	-
	Tersedianya tanah untuk pengembangan Pasar Karanganyar	1 paket	Revitalisasi Pasar Tradisional Karanganyar	1.500.000.000
	Terpenuhinya sarpras Pasar Bobotsari	4 paket	Penyempurnaan Pasar Bobotsari	1.868.500.000
	Terlaksananya pemindahan pedagang Pasar Bobotsari	980 pedagang	Sosialisasi Pemindahan Pedagang Pasar	284.514.000
	Terbangunnya Kya Kya Bobotsari	100%	Pembangunan Kya Kya Bobotsari	-
	Tersusunnya DED Pasar Bukateja	1 paket	Penyusunan DED Pengembangan Pasar Bukateja	50.000.000
	Tersusunnya DED Pasar Karanganyar	1 paket	Penyusunan DED Pasar Karanganyar	50.000.000
	Terpenuhinya urugan tanah untuk pendukung Pembangunan Pasar Bukateja	1 paket	Pendampingan Revitalisasi Pasar Bukateja	200.000.000
	Tersusunnya DED Pasar Tobong	1 paket	Penyusunan DED Pasar Tobong	50.000.000
	Meningkatnya pelayanan Pasar Milik PEMDA dan tercapainya target PAD	18 pasar	Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar	835.811.000
	Meningkatnya pelayanan Pasar Segamas dan tercapainya target PAD	2.199 pedagang	Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar Segamas	1.981.758.000
	Terevitalisasinya	1 paket	Revitalisasi Pasar	314.000.000

sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
	Pasar Penican		Penican	
	Tertatanya PKL di Kawasan Kota Purbalingga	7 paguyuban	Fasilitasi dan Pengawasan Pedagang Kaki lima	10.000.000
Meningkatnya Kemandirian dan daya saing industri			Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	24.311.000.000
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan UPTD Logam dan LIK Logam	12 bulan	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan UPTD Logam dan LIK Logam	200.000.000
	Fasilitasi Peningkatan Sarana Tempat Usaha Industri Kecil	15 IKM	Fasilitasi Peningkatan Sarana Tempat Usaha Industri Kecil	89.000.000
	Pembangunan Sentra IKM (DAK)	1 paket	Pembangunan Sentra IKM (DAK)	23.532.000.000
	Pelatihan Produk Bersih (Clean Production)	30 IKM	Pelatihan Produk Bersih (Clean Production)	30.000.000
	Pelatihan GMP	30 IKM	Pelatihan GMP	40.000.000
	Magang Teknologi Pengolahan Pangan	5 IKM	Magang Teknologi Pengolahan Pangan	50.000.000
	Pelatihan Pengemasan IKM Makanan Olahan	25 IKM	Pelatihan Pengemasan IKM Makanan Olahan	50.000.000
	Pelatihan E-Commerce bagi Pelaku IKM	20 IKM	Pelatihan E-Commerce bagi Pelaku IKM	-
	Peningkatan Kualitas SDM IKM Batik Kab. Purbalingga	50 IKM	Peningkatan Kualitas SDM IKM Batik Kab. Purbalingga	270.000.000
	Pemberdayaan SDM Penyuluh Perindag	8 IKM	Pemberdayaan SDM Penyuluh Perindag	25.000.000
	Penyusunan Raperda Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK)	1 paket	Penyusunan Raperda Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK)	25.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan

sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan secara lengkap.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X > 85$: Sangat Berhasil
$70 < X \leq 85$: Berhasil
$55 < X \leq 70$: Cukup Berhasil
$X \leq 55$: Tidak Berhasil

B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.

Untuk setiap sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator yang meliputi indikator

makro, indikator Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dan Indikator mikro baik berupa indikator kunci (KPI) / *ultimate outcomes*, *intermediate outcomes* serta *immediate outcomes* bahkan indikator output, sejalan dengan akan dikembangkannya media dan sistem pengumpulan data kinerja oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku industri	Kontribusi PDRB Sektor Industri	(Rp. Juta)	3.968.693,25	4.032.212,2	Naik 1,60%
2	Meningkatnya kualitas sarpras perdagangan dan pengamanan perdagangan	Prosentase sarpras perdagangan yang direvitalisasi	%	24%	29%	Naik 20,83

1. Sasaran meningkatnya pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, efektif dan efisien

Sasaran ini dicapai melalui Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- a) Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
- b) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- c) Pemeliharaan Sarana & Prasarana Kantor
- d) Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor
- e) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- f) Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	%
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, efektif dan efisien	Terpenuhinya kebutuhan untuk belanja operasional kantor	100%	100%	100
	Terpenuhinya kebutuhan akan belanja perjalanan dinas	100%	100%	100
	Terpeliharanya sarana prasarana penunjang kantor	100%	100%	100
	Terpenuhinya saran penunjang operasional kantor	100%	100%	100
	Meningkatnya SDM PNS	100%	60%	60
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban	100%	100%	100
	Total Nilai (Rp.)	1.544.782.000	1.160.483.791	75,12

2. Sasaran Terdistribusinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dan Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana & Prasarana Perdagangan yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

- a) Pengawasan Distribusi Barang Penting dan Strategis serta Penyusunan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat;
- b) Operasi Pasar / Fasilitasi Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat;
- c) Pelatihan Prosedur Ekspor Bagi UKM Berorientasi Ekspor;

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- a) Pengawasan Perdagangan BDKT dan Barang dalam pengawasan;
- b) Metrologi Legal;

Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana & Prasarana Perdagangan

- a) Penataan Eks Terminal Jompo;
- b) Penataan Pasar Arjobinangun;
- c) Penataan PKL;
- d) Revitalisasi Pasar Tradisional Karanganyar;
- e) Penyempurnaan Pasar Bobotsari;
- f) Sosialisasi Pemindahan Pedagang Pasar;
- g) Pembangunan Kya Kya Bobotsari;
- h) Penyusunan DED Pengembangan Pasar Bukateja;
- i) Penyusunan DED Pasar Karanganyar;
- j) Pendampingan Revitalisasi Pasar Bukateja;
- k) Penyusunan DED Pasar Tobong;
- l) Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar;
- m) Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar Segamas;
- n) Revitalisasi Pasar Penican;
- o) Fasilitasi dan Pengawasan Pedagang Kaki lima;

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% (R-T)/T x 100%
	Terpantau dan terkendalinya distribusi dan stok barang ke pokmas di masyarakat	12 bulan	12	100
	Terlaksananya operasi pasar murah bagi masyarakat	18 lokasi	6	33
	Meningkatnya jumlah UKM berorientasi ekspor	30 UKM	30	100
	Terawasinya peredaran barang kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Monitoring	12 bulan	12	100

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% (R-T)/T x 100%
	Tera Ulang, Ukur Ulang, BDKT			
	Fasilitasi metrologi legal	12 bulan	12	100
	Terpenuhinya sarpras Pasar Bobotsari	4 paket	1	25
	Terlaksananya pemindahan pedagang Pasar Bobotsari	980 pedagang	1.960	200
	Terbangunnya Kya Kya Bobotsari	100%	0	0
	Meningkatnya pelayanan Pasar Milik PEMDA dan tercapainya target PAD	18 pasar	18	100
	Meningkatnya pelayanan Pasar Segamas dan tercapainya target PAD	2.199 pedagang	2.199	100
	Terevitalisasinya Pasar Penican	1 paket	1	100
	Tertatanya PKL di Kawasan Kota Purbalingga	7 paguyuban	7	100
	Tersusunnya DED Pusat Cenderamatan	1 paket	1	0
	Tertatanya Pasar Arjobinangun	1 paket	1	100
	Terbangunnya kawasan PKL di Kota Purbalingga	1 paket	1	0
	Tersedianya tanah untuk pengembangan Pasar Karanganyar	1 paket	1	100
	Tersusunnya DED Pasar Bukateja	1 paket	1	100
	Tersusunnya DED Pasar Karanganyar	1 paket	1	100
	Terpenuhinya urugan tanah untuk	1 paket	1	100

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% (R-T)/T x 100%
	pendukung Pembangunan Pasar Bukateja			
	Tersusunnya DED Pasar Tobong	1 paket	1	100
	Total Nilai (Rp.)	225.088.000	197.410.850	87,70%

3. Sasaran meningkatnya kemandirian dan daya saing industri

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Industri yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- a) Fasilitasi Peningkatan Pelayanan UPTD Logam dan LIK Logam;
- b) Fasilitasi Peningkatan Sarana Tempat Usaha Industri Kecil;
- c) Pembangunan Sentra IKM (DAK);
- d) Pelatihan Produk Bersih (Clean Production);
- e) Pelatihan GMP;
- f) Magang Teknologi Pengolahan Pangan;
- g) Pelatihan Pengemasan IKM Makanan Olahan;
- h) Pelatihan E-Commerce bagi Pelaku IKM;
- i) Peningkatan Kualitas SDM IKM Batik Kab. Purbalingga;
- j) Pemberdayaan SDM Penyuluh Perindag;
- k) Penyusunan Raperda Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK);

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% (R-T)/T x 100%
Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan UPTD Logam dan LIK Logam	12 bulan	1 bulan	100
	Fasilitasi Peningkatan Sarana Tempat Usaha Industri Kecil	15 IKM	15 IKM	100

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% (R-T)/T x 100%
	Industri Kecil			
	Pembangunan Sentra IKM (DAK)	1 paket	1 paket	100
	Pelatihan Produk Bersih (Clean Production)	30 IKM	60 IKM	200
	Pelatihan GMP	30 IKM	30 IKM	100
	Magang Teknologi Pengolahan Pangan	5 IKM	5 IKM	100
	Pelatihan Pengemasan IKM Makanan Olahan	25 IKM	25 IKM	100
	Pelatihan E-Commerce bagi Pelaku IKM	20 IKM	0 IKM	0
	Peningkatan Kualitas SDM IKM Batik Kab. Purbalingga	50 IKM	50 IKM	100
	Pemberdayaan SDM Penyuluh Perindag	8 IKM	8 IKM	100
	Penyusunan Raperda Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK)	1 paket	0 plaket	0
	Total Nilai (Rp.)	24.311.000.000	23.245.853.116	90,90%

C. Akuntabilitas Keuangan / Aspek Keuangan

Tabel
Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
3.06.3.06.01.01.01	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.217.005.000	1.047.495.607	86,07
3.06.3.06.01.01.01.01	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	578.343.000	433.922.807	75,03
3.06.3.06.01.01.01.02	Rapat-rapat Koordinasi dan	206.054.000	205.578.300	99,77

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
3.06.3.06.01.01.01.03	Konsultasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	325.114.000	303.406.000	93,32
3.06.3.06.01.01.01.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	95.878.000	93.378.000	97,39
3.06.3.06.01.01.01.07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5.000.000	4.594.500	91,89
3.06.3.06.01.01.01.08	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	6.616.000	6.616.000	100,00
3.06.3.06.01.01.15	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	327.400.000	269.119.050	82,20
3.06.3.06.01.01.15.01	Pengawasan Distribusi Barang Penting dan Strategis serta Penyusunan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat	72.400.000	70.277.250	97,07
3.06.3.06.01.01.15.02	Operasi Pasar / Fasilitasi Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat	230.000.000	174.668.800	75,94
3.06.3.06.01.01.15.03	Pelatihan Prosedur Ekspor Bagi UKM Berorientasi Ekspor	25.000.000	24.173.000	96,69
3.06.3.06.01.01.16	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	555.531.000	217.180.360	39,09
3.06.3.06.01.01.16.01	Pengawasan Perdagangan BDKT dan Barang dalam pengawasan Metrologi Legal	72.295.000	66.046.250	91,36
3.06.3.06.01.01.16.02	Metrologi Legal	483.236.000	151.134.110	31,28
3.06.3.06.01.01.17	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana & Prasarana Perdagangan	7.356.539.000	5.245.272.452	71,30
3.06.3.06.01.01.17.10	Penataan Eks Terminal Jompo	-	-	0,00
3.06.3.06.01.01.17.11	Penataan Pasar Arjobinangun	211.956.000	210.509.000	99,32
3.06.3.06.01.01.17.12	Penataan PKL	-	-	0,00
3.06.3.06.01.01.17.13	Revitalisasi Pasar Tradisional Karanganyar	1.500.000.000	30.163.600	2,01
3.06.3.06.01.01.17.14	Penyempurnaan Pasar Bobotsari	1.868.500.000	1.632.665.900	87,38
3.06.3.06.01.01.17.15	Sosialisasi Pemindahan Pedagang Pasar	284.514.000	212.597.500	74,72
3.06.3.06.01.01.17.16	Pembangunan Kya Kya	-	-	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
3.06.3.06.01.01.17.17	Bobotsari Penyusunan DED Pengembangan Pasar Bukateja	50.000.000	49.900.000	99,80
3.06.3.06.01.01.17.19	Penyusunan DED Pasar Karanganyar	50.000.000	-	0,00
3.06.3.06.01.01.17.21	Pendampingan Revitalisasi Pasar Bukateja	200.000.000	199.114.000	99,56
3.06.3.06.01.01.17.22	Penyusunan DED Pasar Tobong	50.000.000	-	0,00
3.06.3.06.01.01.17.02	Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar	835.811.000	639.115.692	76,47
3.06.3.06.01.01.17.03	Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar Segamas	1.981.758.000	1.955.603.760	98,68
3.06.3.06.01.01.17.07	Revitalisasi Pasar Penican	314.000.000	305.643.000	97,34
3.06.3.06.01.01.17.09	Fasilitasi dan Pengawasan Pedagang Kaki lima	10.000.000	9.960.000	99,60
3.07.3.06.01.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	24.311.000.000	23.248.400.266	95,63
3.07.3.06.01.01.17.01	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan UPTD Logam dan LIK Logam	200.000.000	196.107.766	98,05
3.07.3.06.01.01.17.04	Fasilitasi Peningkatan Sarana Tempat Usaha Industri Kecil	89.000.000	85.180.000	95,71
3.07.3.06.01.01.17.05	Pembangunan Sentra IKM (DAK)	23.532.000.000	22.678.910.600	96,37
3.07.3.06.01.01.17.06	Pelatihan Produk Bersih (Clean Production)	30.000.000	24.621.000	82,07
3.07.3.06.01.01.17.08	Pelatihan GMP	40.000.000	33.083.400	82,71
3.07.3.06.01.01.17.09	Magang Teknologi Pengolahan Pangan	50.000.000	42.578.600	85,16
3.07.3.06.01.01.17.10	Pelatihan Pengemasan IKM Makanan Olahan	50.000.000	24.160.650	48,32
3.07.3.06.01.01.17.11	Pelatihan E-Commerce bagi Pelaku IKM	-	-	0,00
3.07.3.06.01.01.17.15	Peningkatan Kualitas SDM IKM Batik Kab. Purbalingga	270.000.000	148.271.750	54,92
3.07.3.06.01.01.17.17	Pemberdayaan SDM Penyuluh Perindag	25.000.000	15.486.500	61,95
3.07.3.06.01.01.17.18	Penyusunan Raperda Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK)	25.000.000	-	0,00
		33.767.475.000	30.027.467.735	88,92

Tabel
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.166.800.000	7.481.447.050	91,61
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	6.026.800.000	5.685.008.100	94,33
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	75.000.000	101.852.000	135,80
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar	5.951.800.000	5.583.156.100	93,81
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.140.000.000	1.796.438.950	83,95
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	340.000.000	366.728.950	107,86
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.800.000.000	1.429.710.000	79,43
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	19.171.650	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	-	17.528.850	100
4.1.4.08.06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	-	17.518.850	100
4.1.4.08.15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	10.000	100
4.1.4.19	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	-	1.642.800	100
4.1.4.19.01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	-	1.642.800	100
	JUMLAH	8.166.800.000	7.500.618.700	91,84

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan

LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2017, disusun mengacu pada Rencana Strategis Dinas tahun 2016 - 2021. Sesuai dengan salah satu tujuannya, maka laporan ini merupakan evaluasi dari tujuan, kebijakan dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sudah tentu dalam pelaksanaannya ada yang sudah berjalan dengan baik ataupun justru sebaliknya. Namun demikian kita yakin dengan sistem yang telah dijalankan ini, kinerja instansi dapat ditingkatkan. Dengan demikian secara bertahap good governance dapat diwujudkan.

B. Permasalahan Yang Dihadapi

Keberhasilan suatu program dan kegiatan dalam upaya pemberdayaan UMKM ditentukan oleh faktor utama yaitu data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang valid akan lebih memudahkan dalam perencanaan pembangunan sehingga tujuan dan sasaran yang dicapai akan lebih jelas dan tepat sasaran.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Data merupakan faktor yang sangat penting, agar ketersediaan data yang valid mudah didapat maka diperlukan ketersediaan dana yang cukup, sehingga dengan adanya data yang baik perencanaan pembangunan akan lebih terencana dan hasil pembangunan pun akan lebih mudah terukur.